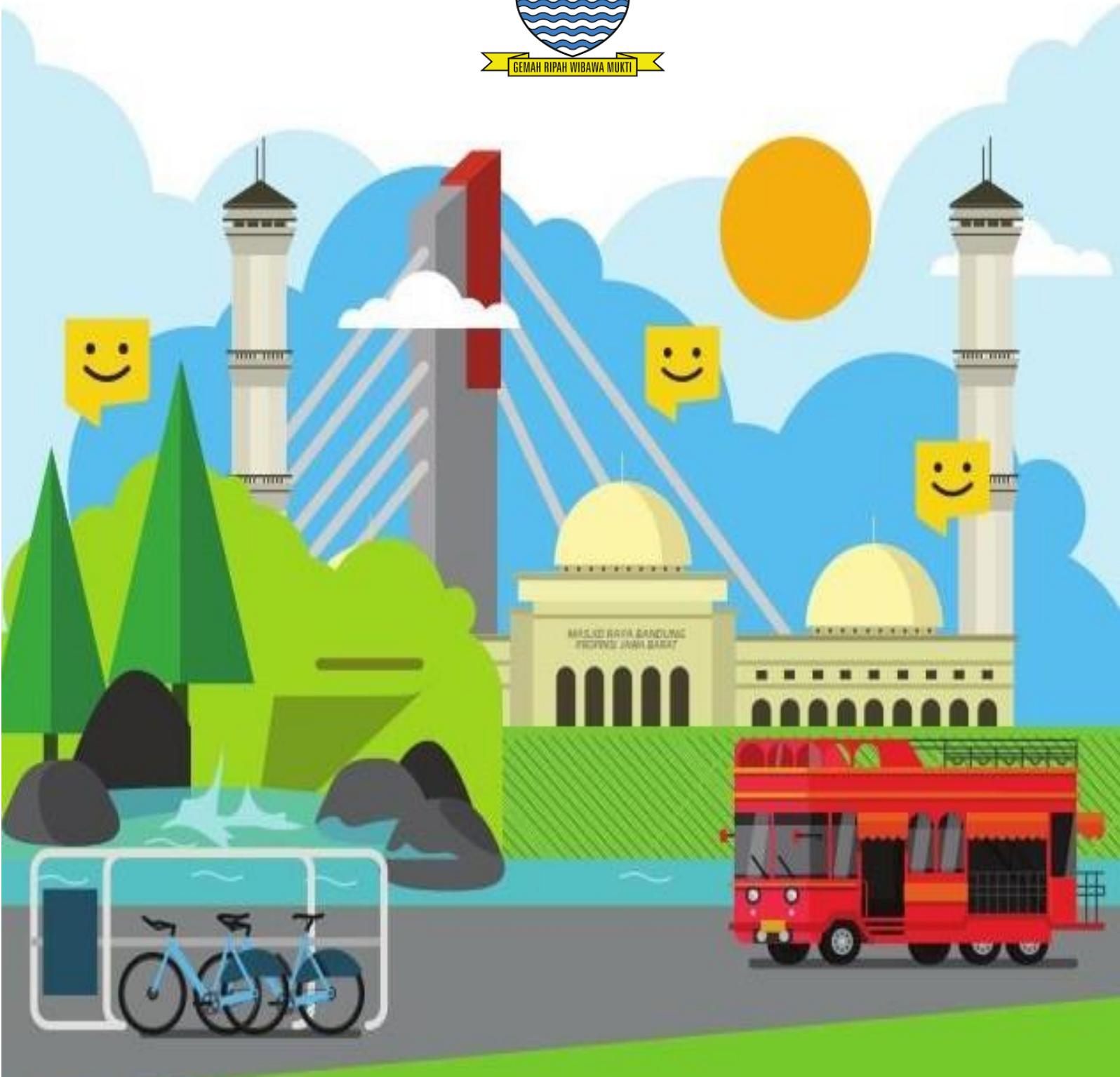


**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BANDUNG TAHUN 2018 – 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Hal ini dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis merupakan komitmen DPPKB yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi DPPKB dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kota Bandung.

Rencana Strategis memuat indikator kinerja DPPKB Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Dengan terbitnya Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN DPPKB dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung



Drs. H. ANDRI DARUSMAN, M.Si
NIP. 196811151988031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANANDPPKB KOTA BANDUNG	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKB.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Anggaran.....	21
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana	23
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB	53
2.4.1 Tantangan	53
2.4.1 Peluang	53
BAB III.....	54
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN.....	54
TUGAS DAN FUNGSI.....	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung	54
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam mendukung Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023	54
3.2.1 Penyelarasan Misi	57
3.2.2 Tujuan	57
3.2.3 Sasaran.....	57
3.2.4 Sasaran Strategis	58
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	58

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	61
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.....	63
BAB IV		65
TUJUAN DAN SASARAN		65
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.....	65
BAB V		50
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		50
5.1	Arah Kebijakan dan Strategi DPPKB Kota Bandung	50
BAB VI.....		54
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		54
VIII PENUTUP		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung (DPPKB) sebagaimana diamanatkan pada peraturan Wali Kota Bandung nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, mempunyai tugas dan fungsi dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2023, BKKBN sebagai lembaga negara yang secara vertical menaungi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2019-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing. Diantaranya DPPKB dibawah kewenangan BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;
 - (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan
 - (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP;

Kesejahteraan Sosial.

- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
 - (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan
 - (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP sebagaimana diatas, Rencana Strategis (Perubahan Renstra) BKKBN Tahun 2019- 2024 disusun secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. RPJMD sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;
4. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;
5. Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Instrumen untuk mengukur kinerja kepala daerah dan kinerja kepala perangkat daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)

Selanjutnya, yang mendasari Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; IKU pemerintah daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Perubahan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis DPPKB, Indikator Program/ Indikator Kinerja Utama/*Outcome* (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/*Output* dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil perhitungan/proyeksi capaian target pada Perubahan RPJMD 2018-2023 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMD periode sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang

dirancang dalam Perubahan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 tentang Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Tahun 2018-2023 adalah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi utamanya untuk merespon perubahan

kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga RPJMD dapat dijadikan pedoman dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah Kota Bandung yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan untuk merespon perubahan yang terjadi sesuai tugas dan fungsi DPPKB;
- Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPPKB Kota Bandung Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

o Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra DPPKB dan sistematika penulisan.

o Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi melalui Reviu Renstra Perangkat Daerah.

o Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu-isu strategis.

o Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan penjabaran

visi dan misi Pemerintah Kota Bandung yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan

jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif.

o Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung yang menjadi urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sampai dengan akhir periode di Tahun 2023.

o Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang di dalamnya dijelaskan program dalam pencapaian strategidan sasaran yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Strategi (Renstra) beserta indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif, target berdasarkan bidang urusan.

o Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

o Bab VIII : Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan program pembangunan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan dua urusan, yakni urusan Pengendalian Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana lingkup Kota Bandung. Pembentukan BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BPPKB Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi BPPKB kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama BPPKB Kota Bandung menjadi DPPKB Kota Bandung.

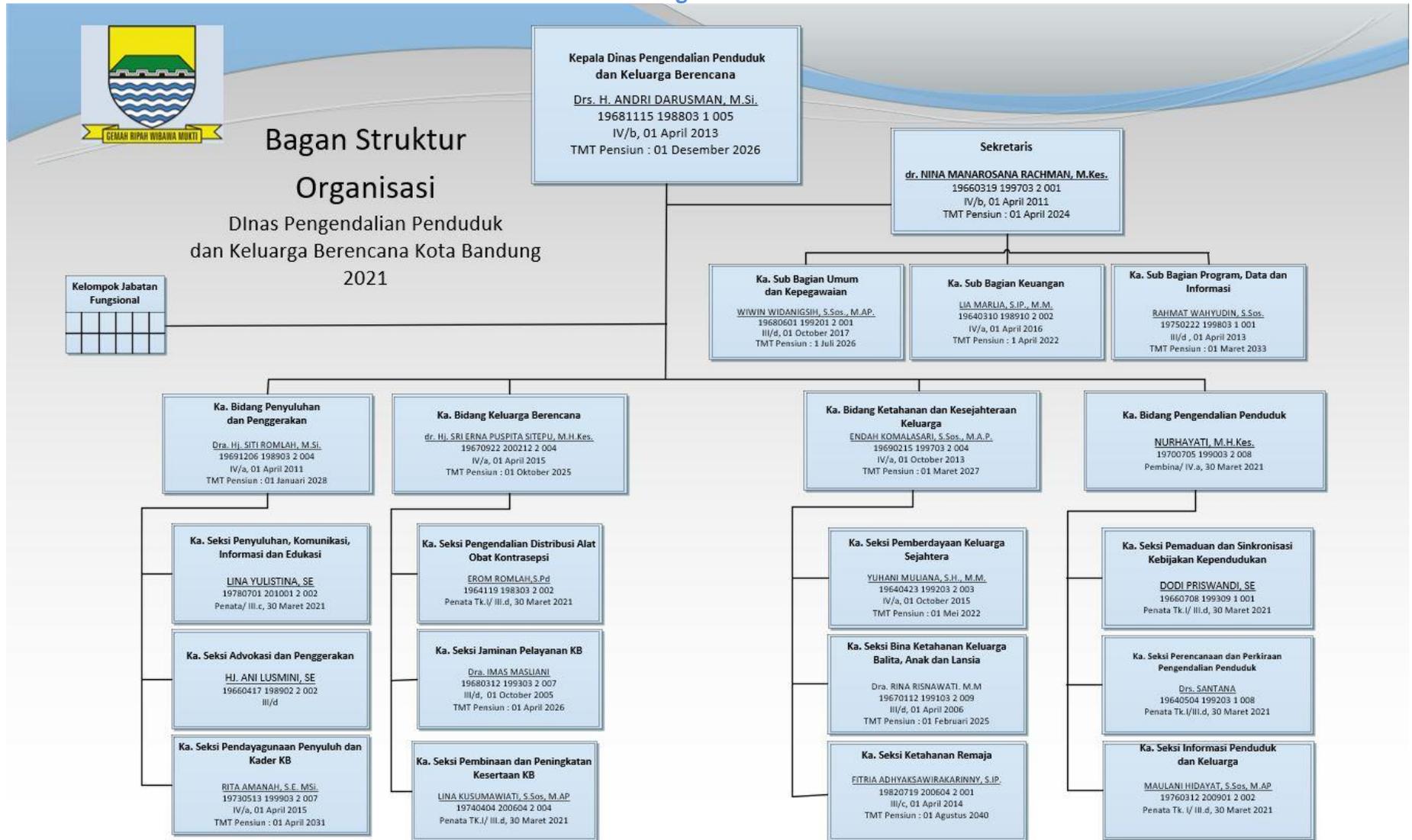
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Nomor 25 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahi:

- a. Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana.
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
 - b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Kepala seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
 5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia;
 - c. Kepala Seksi Ketahanan Remaja.
 6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Kependudukan;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - c. Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga.
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
 8. Jabatan Pelaksana dan Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPPKB
Kota Bandung



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas diatas, DPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas dan Fungsi DPPKB ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1388 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

- Tugas :** Melaksanakan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

- Tugas :** Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan
- Fungsi :**
1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup kesekretariatan dan Dinas;

2. Pengekoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
3. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Dinas;
4. Pengekoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Dinas;
5. Pengekoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- Tugas :** Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penyuluhan dan Penggerakan;
- Fungsi :**
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyuluhan dan penggerakan;
 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup penyuluhan dan penggerakan;
 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup penyuluhan dan penggerakan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan dan penggerakan;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup penyuluhan dan penggerakan; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG KELUARGA BERENCANA

- Tugas :** Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana.
- Fungsi :**
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keluarga berencana;
 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup keluarga berencana;
 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keluarga berencana;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup keluarga berencana; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- Tugas :** Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Fungsi :**
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

- Tugas :** Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian penduduk.
- Fungsi :**
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk;
 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup pengendalian penduduk;
 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup pengendalian penduduk;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian penduduk; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Tugas :** Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :** Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada DPPKB Kota Bandung.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi- fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang

mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPPKB Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 62 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi DPPKB Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, DPPKB menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. DPPKB bermitra dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh DPPKB melalui 4 (empat) bidang penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta engendalian penduduk. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam perencanaan kegiatan. Bidang lainnya dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting*. Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memberikan dukungan berupa penyediaan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala DPPKB	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	3	5	9
3.	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	-	-	1	3	5	9
4.	Bidang Keluarga Berencana	-	-	1	3	2	6
5.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1	3	2	6
6.	Bidang Pengendalian Penduduk	-	-	1	3	1	5
7.	UPT	-	-	-	-	-	-
8.	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-	-	-	-
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	26	26
	JUMLAH	0	1	5	15	41	62

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2021

Yang menjadi catatan dalam struktur DPPKB adalah adanya jabatan fungsional tertentu yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala DPPKB dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Banyaknya ASN yang akan memasuki usia pensiun baik ASN yang memegang jabatan struktural maupun ASN Fungsional Tertentu sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan sangat mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. PLKB merupakan tenaga fungsional penyuluh lapangan BKKBN Pusat yang ditempatkan di Kota Bandung, sedangkan Kota Bandung sendiri tidak memiliki ASN tenaga penyuluh lapangan. Untuk saat ini jumlah staff yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun di sekretariat masih sangat kurang. Berdasarkan data Analisa Pemetaan Jabatan Fungsional DPPKB dari

sebanyak 58 tenaga fungsional jumlah pemangku jabatan tertentu dan jabatan fungsional, masih kurang sebanyak 18 tenaga fungsional umum di DPPKB. Kondisi kepegawaian DPPKB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D 3	SLTA	SLT P	S D	Ju mla h
1	Kepala DPPKB	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	2	-	3	-	-	9
3	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	-	2	6	-	1	-	-	9
4	Bidang Keluarga Berencana	-	3	2	-	1	-	-	6
5	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	3	3	-	-	-	-	6
6	Bidang Pengendalian Penduduk	-	2	3	-	-	-	-	5
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	1	20	1	4	-	-	26
	JUMLAH	0	16	36	1	9	0	0	62
	Dalam Persen	0	25,80	58,06	1,62	14,52	0	0	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung
Tahun 2021

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB sebanyak 16 orang atau sebesar 25,80%. Dengan rata-rata tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPPKB secara umum.

Jumlah aparatur DPPKB yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 36 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 58% dari seluruh aparatur DPPKB. Sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPPKB

sebagai lembaga teknis secara optimal.

DPPKB mengalami kendala dalam sumber daya manusia yang mengelola program Bangga Kencana di kewilayahan, karena terbatasnya jumlah tenaga lini lapangan yang ada dan tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandung. Dimana jumlah tenaga penggerak Non ASN yang ada saat ini berjumlah sebanyak 52 orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sejumlah 151 kelurahan di Kota Bandung. Hal ini berkaitan dengan program dan kegiatan Bangga Kencana yang harus dapat disampaikan secara langsung ke seluruh lapisan. Terkait dengan hal tersebut maka diusulkan penambahan tenaga penggerak Bangga Kencana sebanyak jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandung. Begitu pula untuk jumlah tenaga penyuluh lapangan ASN yang statusnya saat ini adalah sebagai ASN pusat semakin berkurang jumlahnya karena banyaknya yang memasuki usia pensiun. Tidak hanya untuk tenaga ASN di lapangan tetapi juga tenaga ASN fungsional umum yang jumlahnya masih kurang memadai. Dari total jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan yang sebanyak 58 orang masih belum tersisi sebanyak 18 orang atau sebesar 31,03%. Maka dalam hal ketersediaan SDM masih menjadi isu strategis.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, DPPKB Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2013-2020 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran DPPKB Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	25.617.927.691,95	18.928.653.478,00	73,89%
2	2014	19.068.059.800,00	15.948.899.351,00	83,64%
3	2015	17.038.817.070,67	15.600.550.795,00	91,56%
4	2016	21.787.882.612,00	17.435.061.927,00	63,92%
5	2017	9.188.678.325,00	7.911.275.375,00	86,10%
6	2018	29.274.517.451,12	18.289.077.252,00	62,47%
7	2019	25.409837.927,41	19.248.652.431,00	75,75%
8	2020	19.903.611.150,04	16.651.403.327,00	83,66%

Sumber : Sub Bagian Keuangan DPPKB Tahun 2013-2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran DPPKB pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi *covid-19* ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020, bahwa angka LPE Kota Bandung menurun sebesar -2,28. Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. DPPKB sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi kurang lebih sebesar 35%.

Namun demikian, meskipun anggaran DPPKB mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

DPPKB Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Maskumambang No.4 dan mulai digunakan pada tahun 2017. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPPKB Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana DPPKB Kota
Bandung Sampai Dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Banyakn ya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	7	Baik
2	Kendaraan roda 2	66	Baik
3	AC	8	Baik
4	Lemari/Rak/Bufet/Filling Cabinet	103	Baik
5	Brankas	6	Baik
6	Meja	80	Baik
7	Kursi	150	Baik
9	Pesawat telepon/faks.	8	Baik
10	Mesin Tik	15	Baik
11	Komputer	46	Baik
12	Note Book/Laptop	33	Baik
13	Printer	27	Baik
14	Scanner	3	Baik
15	Paper Sheredder	1	Baik
16	Projector	3	Baik
17	Layar	3	Baik
19	Handphone	15	Baik
20	Camera Digital	4	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2021

Lokasi Kantor DPPKB cukup strategis berada di tengah kota Kota Bandung memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor DPPKB sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, hanya saja kondisi bangunan yang cukup berusia sehingga membutuhkan ruang kerja yang lebih representative dan keterbatasan ruang kerja yang dapat menampung sumber daya manusia yang lebih banyak membutuhkan banyak perbaikan pada Gedung kantor.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk DPPKB.

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung

Kinerja Pelayanan DPPKB pada Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan urusan Keluarga Berencana dengan focus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode Renstra. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DPPKB (sebagaimana tertera pada Bab II) yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon II beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran(output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan.

- a. Sasaran : “Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga”, dengan Kebijakan Indikator Sasaran Program :
Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang.
- b. Program Pengendalian Penduduk memiliki sasaran program “Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program:
Total Fertility Rate (TFR) Maksimum.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), memiliki sasaran program “Meningkatnya ketahanan keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program :
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DPPKB memiliki sasaran program meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik".

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh seluruh bidang yang ada di DPPKB, meliputi antara lain :

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang kinerjanya akan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri dan berkembang dan Total Fertility Rate (TFR) Maksimum.
- 2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang dan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga).
- 3) Bidang Keluarga Berencana, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan diukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu Total Fertility Rate (TFR) Maksimum dan cakupan kampung keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.
- 4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sasaran meningkatnya ketahanan keluarga, yang akan

diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan cakupan kampung keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon II beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran (Matrik Kinerja dan Pendanaan DPPKB sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase peserta KB aktif	72,29%	72,50%	73%	-	-	-	74,50%	75,28%	76,24%	-	-	-	74,50%
Persentase kelompok tribina aktif	N/A	71,06%	74,56%	-	-	-	86,26%	71,07%	74,73%	-	-	-	86,26%
Jumlah peserta KB baru	2000	2500	2625	-	-	-	3040 Pasangan Akseptor	2528	3410	-	-	-	3040 Pasangan Akseptor
Jumlah Kampung Berencana KB aktif	15	20	31	-	-	-	58 Kampung KB	20	31	-	-	-	58 Kampung KB
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	79,56	-	-	80,56	81,56	82,56	82,56 Persen	-	-	80,66	-	-	82,56 Persen
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	89,23	-	-	90,23	91,23	92,23	92,23 Persen	-	-	90,23	-	-	92,23 Persen
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	87,69	-	-	88,69	89,69	90,69	90,69 Persen	-	-	88,69	-	-	90,69 Persen
Rumah Dataku Aktif	24,62	-	-	24,62	30,77	36,92	36,92 Persen	-	-	24,62	-	-	36,92 Persen

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	10,91	-	-	16,36	23,64	30,91	30,91 Persen	-	-		-	-	30,91 Persen
Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	76,24	-	-	76,27	76,92	77,57	77,57 Persen	-	-	77,24	-	-	77,57 Persen
Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)	13,19	-	-	13,00	12,00	11,00	11 Persen	-	-	13,00	-	-	11 Persen
Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu	70,00	-	-	80,00	90,00	100,00	100 Persen	-	-	80,00	-	-	100 Persen
Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	-	-	-	53,09	54,07	54,07 Indeks	-	-	-	-	-	54,07 Indeks
Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	N/A	-	-	-	48,13	48,58	48,58 Indeks	-	-	-	-	-	48,58 Indeks

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 1388 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh DPPKB Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
7. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan,
8. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
9. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
10. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
11. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan Rencana Strategis daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta Rencana Strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
15. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
20. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
21. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan melaksanakan tugas lainnya dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.022.007.551,00	3.349.073.997	3.440.593.074	3.531.463.395	3.529.732.496	3.217.606.041	2.679.259.198	2.752.474.459	2.825.170.716	2.823.785.997							
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.103.360,00	126.654.513	130.115.561	133.552.074	133.486.615	121.682.688	101.323.610	104.092.448	106.841.659	106.789.292	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.289.502,00	51.034.981	52.429.597	53.814.328	53.787.951	49.031.602	40.827.984	41.943.678	43.051.462	43.030.361	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	103.482.000,00	86.168.131	88.522.820	90.860.818	90.816.284	82.785.600	68.934.505	70.818.256	72.688.654	72.653.027	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	109.800.000,00	91.429.049	93.927.501	96.408.243	96.360.990	87.840.000	73.143.239	75.142.001	77.126.594	77.088.792	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	45.400.000,00	37.803.997	38.837.054	39.862.789	39.843.251	36.320.000	30.243.197	31.069.643	31.890.231	31.874.601	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	223.009.593,00	185.697.222	190.771.711	195.810.228	195.714.254	178.407.674	148.557.778	152.617.369	156.648.182	156.571.403	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	167.248.000,00	139.265.260	143.070.917	146.849.597	146.777.621	133.798.400	111.412.208	114.456.734	117.479.678	117.422.097	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.280.760,00	25.214.400	25.903.426	26.587.567	26.574.536	24.224.608	20.171.520	20.722.740	21.270.054	21.259.628	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.295.100,00	78.518.318	80.663.963	82.794.398	82.753.817	75.436.080	62.814.654	64.531.170	66.235.518	66.203.054	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.072.000,00	32.534.752	33.423.819	34.306.583	34.289.769	31.257.600	26.027.802	26.739.055	27.445.267	27.431.815	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	382.258.400,00	318.301.657	326.999.785	335.636.254	335.471.746	305.806.720	254.641.326	261.599.828	268.509.003	268.377.397	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	-3%	10%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	676.769.000,00	563.536.848	578.936.440	594.226.868	593.935.616	541.415.200	450.829.479	463.149.152	475.381.494	475.148.493	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	1.753.999.836,00	1.460.533.121	1.500.444.644	1.540.073.244	1.539.318.398	1.403.199.869	1.168.426.497	1.200.355.715	1.232.058.595	1.231.454.718	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	73.200.000,00	60.952.699	62.618.334	64.272.162	64.240.660	58.560.000	48.762.159	50.094.667	51.417.730	51.392.528	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	-3%	10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	109.800.000,00	91.429.049	93.927.501	96.408.243	96.360.990	87.840.000	73.143.239	75.142.001	77.126.594	77.088.792	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	-3%	10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	962.930.861,00	1.059.223.947	1.165.146.342	1.281.660.976	1.409.827.074	770.344.689	847.379.158	932.117.073	1.025.328.781	1.127.861.659						10%	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	147.216.397,00	161.938.037	178.131.840	195.945.024	215.539.527	117.773.118	129.550.429	142.505.472	156.756.020	172.431.621	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	10%	10%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	815.714.464,00	897.285.910	987.014.501	1.085.715.952	1.194.287.547	652.571.571	717.828.728	789.611.601	868.572.761	955.430.037	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	10%	10%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	128.000.000,00	140.800.000	154.880.000	170.368.000	187.404.800	102.400.000	112.640.000	123.904.000	136.294.400	149.923.840						10%	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	128.000.000,00	140.800.000	154.880.000	170.368.000	187.404.800	102.400.000	112.640.000	123.904.000	136.294.400	149.923.840	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	10%	10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.700.000,00	150.370.000	165.407.000	181.947.700	200.142.470	109.380.000	120.296.000	132.325.600	145.558.160	160.113.976						10%	
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	136.700.000,00	150.370.000	165.407.000	181.947.700	200.142.470	109.380.000	120.296.000	132.325.600	145.558.160	160.113.976	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	10%	10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.915.000,00	155.006.500	170.507.150	187.557.865	208.313.652	112.732.000	124.005.200	136.405.720	150.046.292	165.050.921						10%	
Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	140.915.000,00	155.006.500	170.507.150	187.557.865	206.313.652	112.732.000	124.005.200	136.405.720	150.046.292	165.050.921	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	1 : 0,8	10%	10%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Keluarga Berencana	6.202.814.500,00	6.538.493.750	6.889.210.815	7.262.152.971	7.656.590.396	4.675.649.400	4.928.262.690	5.195.389.727	5.477.944.505	5.776.905.552						5%	
Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	209.240.000,00	230.164.000	253.180.400	278.498.440	306.348.284	167.392.000	184.131.200	202.544.320	222.798.752	245.078.627	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	4.392.369.000,00	4.611.987.450	4.842.586.823	5.084.716.164	5.336.951.972	3.294.276.750	3.458.990.588	3.631.940.117	3.813.537.123	4.004.213.979	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	5%	5%
Kegiatan Sub Bidang KB (DAK Fisik)	1.339.675.000,00	1.406.658.750	1.476.991.688	1.550.841.272	1.628.383.335	1.004.756.250	1.054.994.063	1.107.743.766	1.163.130.954	1.221.287.502	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	1: 0,75	5%	5%
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	168.462.500,00	185.308.750	203.839.625	224.223.588	246.645.946	134.770.000	148.247.000	163.071.700	179.378.870	197.316.757	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	93.068.000,00	102.374.800	112.612.280	123.873.508	136.260.859	74.454.400	81.899.840	90.089.824	99.098.806	109.008.687	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Program Pengendalian Penduduk	857.380.000,00	943.118.000	1.037.429.800	1.141.172.780	1.255.290.058	685.904.000	754.494.400	829.943.840	912.938.224	1.004.232.046						10%	
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	247.530.000,00	272.283.000	299.511.300	329.462.430	362.408.673	198.024.000	217.826.400	239.609.040	263.569.944	289.926.938	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	340.260.000,00	374.286.000	411.714.600	452.886.060	498.174.666	272.208.000	299.428.800	329.371.680	362.308.848	398.539.733	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan	269.590.000,00	296.549.000	326.203.900	358.824.290	394.706.719	215.672.000	237.239.200	260.963.120	287.059.432	315.765.375	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Program Promosi Keluarga Berencana	1.003.004.000,00	1.103.304.400	1.213.634.840	1.334.998.324	1.468.498.156	802.403.200	882.643.520	970.907.872	1.067.998.659	1.174.798.525						10%	
Kegiatan Advokasi dan Penggerakkan	245.000.000,00	269.500.000	296.450.000	326.095.000	358.704.500	196.000.000	215.600.000	237.160.000	260.876.000	286.963.600	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	251.902.000,00	277.092.200	304.801.420	335.281.562	368.809.718	201.521.600	221.673.760	243.841.136	268.225.250	295.047.775	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	506.102.000,00	556.712.200	612.383.420	673.621.762	740.983.938	404.881.600	445.369.760	489.906.736	538.897.410	592.787.151	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Program Ketahanan Keluarga	808.534.000,00	889.387.400	978.326.140	1.076.158.754	1.183.774.629	646.827.200	711.509.920	782.660.912	860.927.003	947.019.704						10%	
Kegiatan BKB, BKL dan BKR	165.272.000,00	181.799.200	199.979.120	219.977.032	241.974.735	132.217.600	145.439.360	159.983.296	175.981.626	193.579.788	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	394.110.000,00	433.521.000	476.873.100	524.560.410	577.016.451	315.288.000	346.816.800	381.498.480	419.648.328	461.613.161	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%
Kegiatan Ketahanan Remaja	249.152.000,00	274.067.200	301.473.920	331.621.312	364.783.443	199.321.600	219.253.760	241.179.136	265.297.050	291.826.755	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	1: 0,8	10%	10%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			22.253.176.600	40.879.605.542	44.967.566.096		-		32.703.684.434	35.974.052.877							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	11.705.318.600	13.901.801.042	14.596.891.094	-	-	8.410.278.420	11.121.440.834	11.677.512.875							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	128.174.750	179.072.400	188.026.020	0	0	94.876.100	143.257.920	150.420.816							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	16.412.750	44.432.400	46.654.020	0	0	13.636.500	35.545.920	37.323.216	-	-	1 : 0,83	1 : 0,8	1 : 0,8	88%	83%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0	0	90.402.000	78.000.000	81.900.000	0	0	74.999.600	62.400.000	65.520.000	-	-	1 : 0,82	1 : 0,8	1 : 0,8	-4%	-6%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	21.360.000	56.640.000	59.472.000	0	0	6.240.000	45.312.000	47.577.600	-	-	1 : 0,29	1 : 0,8	1 : 0,8	85%	316%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	8.520.872.774	9.591.963.288	10.071.561.452	0	0	6.033.188.664	7.673.570.830	8.057.249.162							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	8.485.408.774	9.556.499.288	10.034.324.252	0	0	6.019.408.664	7.645.199.430	8.027.459.402	-	-	1 : 0,70	1 : 0,8	1 : 0,8	9%	16%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	7.072.000	21.840.000	22.932.000	0	0	1.768.000	17.472.000	18.345.600	-	-	1 : 0,25	1 : 0,8	1 : 0,8	107%	447%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	6.552.000	6.552.000	6.879.600	0	0	6.552.000	5.241.600	5.503.680	-	-	1 : 1	1 : 0,8	1 : 0,8	3%	-8%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	21.840.000	7.072.000	7.425.600	0	0	5.460.000	5.657.600	5.940.480	-	-	1 : 0,25	1 : 0,8	1 : 0,8	-31%	4%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	186.500.000	443.449.950	465.622.448	-	-	183.746.090	354.759.960	372.497.958							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	186.500.000	157.250.000	165.112.500	0	0	183.746.090	125.800.000	132.090.000	-	-	1 : 0,98	1 : 0,8	1 : 0,8	-5%	-13%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Administrasi Umum	0	0	0	286.199.950	300.509.948	0	0	-	228.959.960	240.407.958	-	-	-	1 : 0,8	1 : 0,8	5%	5%
Perangkat Daerah	0	0	640.537.556	1.074.000.884	1.127.700.928	0	0	397.864.954	859.200.707	902.160.743							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	23.020.300	23.020.300	24.171.315	0	0	6.462.900	18.416.240	19.337.052	-	-	1:0,28	1:0,8	1:0,8	3%	95%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	200.605.056	237.966.300	249.864.615	0	0	165.670.580	190.373.040	199.891.692	-	-	1:0,82	1:0,8	1:0,8	12%	10%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	74.091.900	89.871.900	94.365.495	0	0	61.011.724	71.897.520	75.492.396	-	-	1:0,82	1:0,8	1:0,8	13%	11%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	176.818.800	303.180.800	318.339.840	0	0	100.656.000	242.544.640	254.671.872	-	-	1:0,56	1:0,8	1:0,8	38%	73%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	62.039.500	136.029.584	142.831.063	0	0	32.398.750	108.823.667	114.264.851	-	-	1:0,52	1:0,8	1:0,8	62%	120%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	37.092.000	37.092.000	38.946.600	0	0	27.819.000	29.673.600	31.157.280	-	-	1:0,75	1:0,8	1:0,8	3%	6%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	66.870.000	246.840.000	259.182.000	0	0	3.846.000	197.472.000	207.345.600	-	-	1:0,05	1:0,8	1:0,8	137%	2520%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	1.217.557.520	1.219.257.520	1.280.220.398	0	0	822.215.212	975.408.016	1.024.176.317							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	3.300.000	5.000.000	5.250.000	0	0	3.300.000	4.000.000	4.200.000	-	-	1:1	1:0,8	1:0,8	28%	13%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	215.450.000	215.450.000	226.222.500	0	0	69.809.583	172.360.000	180.978.000	-	-	1:0,32	1:0,8	1:0,8	3%	76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	998.807.520	998.807.520	1.048.747.896	0	0	749.105.629	799.046.016	838.998.317	-	-	1:0,75	1:0,8	1:0,8	3%	6%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	1.011.878.000	1.394.057.000	1.463.759.850	0	0	878.387.400	1.115.245.600	1.171.007.880							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	612.110.000	757.450.000	795.322.500	0	0	554.470.200	605.960.000	636.258.000	-	-	1:0,90	1:0,8	1:0,8	14%	7%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	310.810.000	310.810.000	326.350.500	0	0	299.959.700	248.648.000	261.080.400	-	-	1:0,96	1:0,8	1:0,8	3%	-6%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	55.006.000	218.611.000	229.541.550	0	0	-	174.888.800	183.633.240	-	-	1:0	1:0,8	1:0,8	151%	5%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	33.750.000	35.437.500	0	0		27.000.000	28.350.000	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	33.750.000	73.436.000	77.107.800	0	0	23.957.500	58.748.800	61.686.240	-	-	1:0,70	1:0,8	1:0,8	61%	75%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	0	372.634.800	559.623.200	587.604.360	0	0	311.436.300	407.964.800	428.363.040							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	55.516.800	131.492.000	138.066.800	0	0	54.632.600	105.193.600	110.453.280							
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Perkotaan	0	0	55.516.800	131.492.000	138.066.800	0	0	54.632.600	105.193.600	110.453.280	-	-	1:0,98	1:0,8	1:0,8	71%	49%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	317.118.000	428.131.200	449.537.760	0	0	256.803.700	302.771.200	317.909.760							
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	0	110.912.000	118.054.000	123.956.700	0	0	80.782.000	94.443.200	99.165.360	-	-	1:0,72	1:0,8	1:0,8	6%	11%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	0	206.206.000	260.410.000	273.430.500	0	0	176.021.700	208.328.000	218.744.400	-	-	1:0,85	1:0,8	1:0,8	16%	12%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	0	49.667.200	52.150.560	0	0	0	39.733.760	41.720.448	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0	0	8.708.048.001	12.585.835.450	13.215.127.223	0	0	5.541.754.705	9.888.829.960	10.383.271.458							
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	645.225.200	1.112.578.000	1.188.208.900	0	0	597.468.815	814.144.000	854.851.200							
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	0	0	4.375.000	4.593.750	0	0	0	3.500.000	3.675.000	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	283.986.000	431.410.000	452.980.500	0	0	268.653.000	345.128.000	362.384.400	-	-	1:0,94	1:0,8	1:0,8	28%	17%
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	0	0	282.939.200	-	-	0	0	251.281.415	-	-	-	-	1:0,88	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	0	78.300.000	113.895.000	119.589.750	0	0	77.532.400	91.116.000	95.671.800	-	-	1:0,99	1:0,8	1:0,8	25%	11%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	0	468.000.000	491.400.000	0	0	-	374.400.000	393.120.000	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Pengendalian Program KKBPK	0	0	0	94.898.000	99.642.900	0	0	-	75.918.400	79.714.320	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0	0	2.011.600.000	4.434.650.000	4.656.382.500	0	0	1.473.820.600	3.547.720.000	3.725.106.000							
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	0		-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	0	2.011.600.000	4.434.650.000	4.656.382.500	0	0	1.473.820.600	3.547.720.000	3.725.106.000	-	-	1 : 0,73	1 : 0,8	1 : 0,8	63%	73%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	3.827.632.801	4.829.994.900	5.071.494.845	0	0	2.006.473.890	3.863.995.920	4.057.195.716							
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0	344.230.000	63.450.000	66.622.500	0	0	310.774.000	50.760.000	53.298.000	-	-	1 : 0,90	1 : 0,8	1 : 0,8	-38%	-39%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0	2.226.144.000	3.593.267.900	3.772.931.295	0	0	757.742.650	2.874.614.320	3.018.345.036	-	-	1 : 0,34	1 : 0,8	1 : 0,8	33%	142%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	0	47.914.000	50.309.700	0	0	-	38.331.200	40.247.760	-	-	-	1 : 0,8	1 : 0,8	5%	5%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	1.110.290.801	843.675.000	885.858.750	0	0	790.989.240	674.940.000	708.687.000	-	-	1 : 0,71	1 : 0,8	1 : 0,8	-10%	-5%
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0	0	102.000.000	128.520.000	134.946.000	0	0	102.000.000	102.816.000	107.956.800	-	-	1 : 1	1 : 0,8	1 : 0,8	16%	3%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0	0	45.600.000	47.880.000	0	0	-	36.480.000	38.304.000	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	0	7.800.000	27.904.000	29.299.200	0	0	7.800.000	22.323.200	23.439.360	-	-	1:1	1:0,8	1:0,8	131%	96%
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0	0	37.168.000	79.664.000	83.647.200	0	0	37.168.000	63.731.200	66.917.760	-	-	1:1	1:0,8	1:0,8	60%	38%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	2.223.590.000	2.208.612.550	2.319.043.178	0	0	1.463.993.400	1.662.970.040	1.746.118.542							
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	0	0	129.900.000	136.395.000	0	0	-	103.920.000	109.116.000	-	-	-	1:0,8	1:0,8	5%	5%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	0	0	1.527.620.000	1.052.250.000	1.104.862.500	0	0	782.496.000	841.800.000	883.890.000	-	-	1:0,51	1:0,8	1:0,8	-13%	6%
Pembiayaan Terpadu Kampung KB	0	0	695.970.000	1.026.462.550	1.077.785.678	0	0	681.497.400	821.170.040	862.228.542	-	-	1:0,97	1:0,8	1:0,8	26%	13%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0	0	1.467.175.399	13.832.345.850	14.523.963.143	0	0	825.382.399	11.065.876.680	11.619.170.514							
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1.433.335.399	13.591.297.850	14.270.862.743	0	0	791.542.399	10.873.038.280	11.416.690.194							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	651.683.399	987.247.950	1.036.610.348	0	0	509.365.899	789.798.360	829.288.278	-	-	1 : 0,78	1 : 0,8	1 : 0,8	28%	30%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	60.560.000	849.170.000	891.628.500	0	0	40.660.000	679.336.000	713.302.800	-	-	1 : 0,67	1 : 0,8	1 : 0,8	654%	788%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0	11.326.840.000	11.893.182.000	0	0	-	9.061.472.000	9.514.545.600	-	-	-	1 : 0,8	1 : 0,8	5%	5%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	609.500.000	-	-	0	0	130.600.000	-	-	-	-	1 : 0,21	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	70.408.000	225.609.900	236.890.395	0	0	69.732.500	180.487.920	189.512.316	-	-	1 : 0,99	1 : 0,8	1 : 0,8	113%	82%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	0	41.184.000	202.430.000	212.551.500	0	0	41.184.000	161.944.000	170.041.200	-	-	1 : 1	1 : 0,8	1 : 0,8	198%	149%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	33.840.000	241.048.000	253.100.400	0	0	33.840.000	192.838.400	202.480.320							
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	33.840.000	241.048.000	253.100.400	0	0	33.840.000	192.838.400	202.480.320	-	-	1 : 1	1 : 0,8	1 : 0,8	309%	237%
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kota Bandung:

2.4.1 Tantangan

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia DPPKB sebagai tenaga penggerak program Bangga Kencana lini lapangan di kewilayahan.
2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya;
3. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan.
4. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
5. Minimnya pemahaman lintas sektoral terakit integrasi program Kampung KB.
6. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga Berencana.

2.4.2 Peluang

1. Manajemen SDM berbasis kinerja yang lebih baik dengan menerapkan mekanisme *reward* and *punishment* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penyempurnaan SOP dengan menggunakan standar internasional dalam manajemen mutu dengan resertifikasi implementasi ISO 9001:2015;
3. Optimalisasi dan integrasi sistem informasi (IT) yang sudah ada dalam Sistem Informasi Keluarga Berencana (SIDUGA) yang dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi siKeren oleh lini lapangan.
4. Menetapkan pola koordinasi dalam penanganan masalah lintas sektoral.
5. Promosi secara luas tentang program KB dan mempermudah akses layanan Keluarga Berencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya, terutama di tingkat petugas di lini lapangan;
2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah adabelum diterapkan secara optimal;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang Gedung kantor Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan informasi koordinasi dari instansi lain.
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program BANGGA KENCANA

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam mendukung Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023

Sebagaimana tertera diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung (DPPKB) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan

pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga

masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

3.2.1 Penyelarasan Misi

Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi 1 (satu) RPJMD 2018-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

3.2.2 Tujuan

Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

3.2.3 Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah ini :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis.

3.2.4 Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan DPPKB terhadap upaya pencapaian Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan DPPKB yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga, dengan Indikator Strategi :
 - a. Meningkatkan Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang dapat mencapai 33.33% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 39.68 % pada tahun 2023.
 - b. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum dapat mencapai 1,97% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2.00 % pada tahun 2023
2. Meningkatnya ketahanan keluarga dengan Indikator Strategi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ditargetkan menjadi 56.84% pada tahun 2023.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan DPPKB. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka DPPKB menggunakan Indikator Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang, Total Fertility Rate (TFR) Maksimum, dan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga). Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsisebagai berikut :

- Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
 - Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;
 - Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
 - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
 - Penyusunan desain Program KKBPK;
 - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;
 - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
 - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.
- Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
 - Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
 - Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
 - Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
 - Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BKKBN telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi BKKBN 2015-2019 adalah :

“Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN Provinsi Jawa Barat harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Atas dasar tersebut, maka visi BKKBN Propinsi Jawa Barat harus diarahkan pada upaya pembangunan berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang dijadikan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Wali Kota DPPKB harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis (tatalaksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DPPKB secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Kota maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah. Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan DPPKB berangkat dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi DPPKB Kota Bandung dewasa ini dan dimasa mendatang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan DPPKB perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas sebagai berikut:

- a. memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*;
- b. merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi dan *big data*;
- c. menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur organisasi yang lebih “adaptif” terhadap lingkungan bisnis (*adaptive organization*), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien (“*fit-for-purpose*”);
- d. meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang mencakup peningkatan kinerja, kompetensi dan komitmen pegawai; dan
- e. menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam

pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengembangan dan penataan Kelembagaan DPPKB memerlukan proses yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator Kinerja Utama per-unit Eselon II yang akan dicapai dalam RPJMD dan Perubahan Renstra DPPKB periode 2021- 2023, juga harus memperhatikan sinergitas lintas sektor/lintas Kementerian/ Lembaga (KL) serta memperhatikan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan struktur organisasi K/L, pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk. Eselon III dan Eselon IV), serta penambahan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian/ keterampilannya

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Isu Strategis dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kota Bandung

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Koordinasi dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	1. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi antara DPPKB dengan perangkat daerah terkait informasi dan pelaksanaan Program KB
		2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
2.	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi	1. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat menghimpun seluruh produk DPPKB secara terintegrasi agar informasi mengenai program dan kegiatan mudah didapatkan, dan dapat diakses secara luas di masyarakat
3.	Pengendalian dan Evaluasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan	1. Belum adanya standar atau pedoman pengendalian dan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
4.	Sumber Daya Manusia dan Standar Pelayanan	<p>1. Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama tugas di tingkat lini lapangan</p> <p>2. Masih kurangnya Sarana prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi, dan kegiatan di lapangan</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas sehingga tercipta individu sebagai sumber daya manusia berkualitas yang dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, maka untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah ditetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dalam Perubahan Renstra DPPKB.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018- 2023.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan DPPKB dibutuhkan untuk pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan DPPKB yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk serta keluarga berencana menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bandung melalui

pembangunan keluarga berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 tidak berubah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan DPPKB Kota Bandung

TUJUAN (2018 - 2020)	TUJUAN (Perubahan 2021 - 2023)
Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKB, kerangka sasaran pada tahun 2018 sd 2020 tidak digunakan pada sasaran 2021 sd 2023.

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran DPPKB Kota Bandung

SASARAN (2018-2020)	SASARAN (Perubahan 2021 - 2023)
1. Meningkatkan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga
2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga	
3. Meningkatkan Promosi Keluarga Berencana	
4. Meningkatkan Pengendalian Penduduk	2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung mempunyai tujuan dan sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Revisi

MISI KOTA BANDUNG	TUJUAN	SASARAN
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	1. Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis

Untuk mencapai target kedua sasaran tersebut maka kami kami berupaya memfokuskan indikator kinerja sasaran dirubah menjadi 4 indikator kinerja sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB. Maka berdasarkan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 periode 2018 s.d 2020, diuraikan perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA (Tahun 2018-2020)	INDIKATOR KINERJA (Tahun 2021-2023)	Ket
1. Persentase Peserta KB Aktif	1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	IKU
2. Persentase Kelompok Tribina Aktif	2. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	IKU
3. Jumlah Kampung KB Aktif	3. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	IKU
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKU

Selanjutnya perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reuiu tahun ini, diuraikan pada tabel 4.5, tabel 4.6, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Tahun 2018-2023

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2018	TARGET KINERJA SASARAN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Persentase Peserta KB Aktif	71,00 %	72,29 %	73,00 %	73,50 %	74,00 %	74,50 %
			Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina Aktif	-	71,06 %	74,56 %	78,26 %	82,16 %	86,26 %
			Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	75 %	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	2000 orang	2500 orang	2625 orang	2757 orang	2895 orang	3040 orang
				Jumlah Kampung KB Aktif	15 Kampung KB	20 Kampung KB	31 Kampung KB	40 Kampung KB	49 Kampung KB	58 Kampung KB
			Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 4.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perubahan Tahun 2021-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2018	TARGET KINERJA SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	-	-	33,33 %	35,38 %	38,10 %	39,68 %
			Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	-	-	1,97 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
		Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	-	-	N/A	-	55,84 indeks	56,84 indeks
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan DPPKB	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80	80,50	82	83

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Arah Kebijakan dan Strategi DPPKB Kota Bandung

Arah kebijakan dan strategi DPPKB Kota Bandung secara umum mengacu pada arah kebijakandan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2021-2023, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Kota Bandung periode 2021-2023. Adapun arah kebijakan dan strategi DPPKB adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui strategi:
 - 1) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan
 - 2) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana
 - 3) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Rumah Dataku Aktif.
 - 5) Sekolah Siaga Kependudukan Aktif
 - 6) Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR
 - 7) Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)
 - 8) Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu
- a. Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui strategi:
 - 1) Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2) Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan

Berbagai arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
 - c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Umemiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan;
 - c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tangga yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. mendorong pengelolaan keuangan DPPKB secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
 - b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala DPPKB dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - d. mendorong pencapaian sasaran strategis DPPKB secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana tertera di atas, terutama dalam implementasinya, DPPKB akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. DPPKB berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPPKB Kota Bandung

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis			
MISI I : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Meningkatnya ketahanan keluarga	Meningkatnya ketahanan keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Perencanaan Program dan Kegiatan

Rencana Strategis (Perubahan Renstra) DPPKB 2021-2023 memprioritaskan indikator Sasaran Strategis yang harus dicapai secara Kota Bandung, akan tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik di seluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis Kota Bandung serta pemetaan potensi yang dapat menjadi fokus penggarapan di setiap wilayah (Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Perubahan Renstra DPPKB ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Perubahan Renstra per-Unit Kerja Eselon II (UKE I) dan Unit Kerja Eselon III (UKE III) 2021-2023, baik Pemerintah Kota Bandung maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik sampai tingkat intervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan Program Bangsa Kencana dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis

Penetapan target Sasaran Strategis di dalam dokumen Perubahan Renstra ini berdasarkan sumber data *baseline* SDKI 2017 dan Proyeksi Penduduk Kota Bandung Tahun 2015-2045 serta sumber data lainnya yang terpercaya. Adapun hasil penetapan target Sasaran Strategis Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini:

1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang

No	Strategi/ SASARAN	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	33,33	35,38	38,10	39,68	persen

2. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) maksimum

No	Strategi/ SASARAN	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	1,97	2,00	2,00	2,00	persen

3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika pembangunankeluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Kota Bandung. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur

keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Kota Bandung yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Bandung yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

No	Strategi/ SASARAN	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	N/A	-	55.84	56.84	persen

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau Rencana Strategis yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup DPPKB pada akhir tahun perencanaan periode 2013-2018 selalu mengalami perkembangan/perubahan. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup DPPKB yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	100	4.022.007.551	100	3.349.073.997	100	3.440.593.074	100	3.531.463.395	100	3.529.723.496	100	3.529.732.496	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	1	Laporan	1	152,103,360	1	126,654,513	1	130,115,561	1	133,552,074	1	133,486,615	1	133,486,615	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	3	61,289,502	3	51,034,981	3	52,429,597	3	53,814,328	3	53,787,951	3	53,787,951	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90	Unit	90	103,482,000	112	86,168,131	112	88,522,820	112	90,860,818	112	90,816,284	112	90,816,284	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3	Jasa Bulanan	3	109,800,000	3	91,429,049	3	93,927,501	3	96,408,243	3	96,360,990	3	96,360,990	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang Diperbaiki	5	Unit/Jenis	5	45,400,000	5	37,803,997	5	38,837,054	5	39,862,789	5	39,843,251	5	39,843,251	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Laporan	12	223,009,593	12	185,697,222	12	190,771,711	12	195,810,228	12	195,714,254	12	195,714,254	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Laporan	1	167,248,000	1	139,265,260	1	143,070,917	1	146,849,597	1	146,777,621	1	146,777,621	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Laporan	1	30,280,760	1	25,214,400	1	25,903,426	1	26,587,567	1	26,574,536	1	26,574,536	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Laporan	1	94,295,100	1	78,518,318	1	80,663,963	1	82,794,398	1	82,753,817	1	82,753,817	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Laporan	1	39,072,000	1	32,534,752	1	33,423,819	1	34,306,583	1	34,289,769	1	34,289,769	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Laporan	1	382,258,400	1	318,301,657	1	326,999,785	1	335,636,254	1	335,471,746	1	335,471,746	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Laporan	1	676,769,000	1	563,536,848	1	578,936,440	1	594,226,868	1	593,935,616	1	593,935,616	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	7	Orang	7	1,753,999,836	7	1,460,533,121	7	1,500,444,644	7	1,540,073,244	7	1,539,318,398	7	1,539,318,398	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	2	Orang	2	73,200,000	2	60,952,699	2	62,618,334	2	64,272,162	2	64,240,660	2	64,240,660	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3	Orang	3	109,800,000	3	91,429,049	3	93,927,501	3	96,408,243	3	96,360,990	3	96,360,990	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	962.9930.861	100	801.820.152	100	823.731.236	100	845.486.997	100	845.072.593	100	845.072.593	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Laporan	1	147,216,397	1	122,585,202	1	125,935,048	1	129,261,149	1	129,197,793	1	129,197,793	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	90	unit	90	815,714,464	112	679,234,951	112	697,796,187	112	716,225,848	112	715,874,800	112	715,874,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100	Persen	100	128.000.000	100	128.000.000	100	109.496.541	100	112.388.480	100	112.333.394	100	112.333.394	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	150	stel	150	128,000,000	150	128,000,000	150	109,496,541	150	112,388,480	150	112,333,394	150	112,333,394	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnyanya	100	Persen	100	136,700,000	100	113,828,333	100	116,938,884	100	120,027,384	100	119,968,555	100	119,968,555	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	150	Orang	150	136,700,000	150	113,828,333	150	116,938,884	150	120,027,384	150	119,968,555	150	119,968,555	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kota Bandung
			Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	100	Persen	100	140,915,000	100	117,338,109	100	120,544,571	100	123,728,302	100	123,667,658	100	123,667,658	Kasubag Program, Data dan Informasi	Kota Bandung
			Pengembangan Database Terpaduan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Pengembangan Laporan dan Sistem Informasi	20	Dokumen	20	140,915,000	20	117,338,109	20	120,544,571	20	123,728,302	20	123,667,658	20	123,667,658	Kasubag Program, Data dan Informasi	Kota Bandung
	Meningkatnya Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	N/A	Persen	72.29	470.770.500	73.00	517.847.550	73.50	569.632.305	74,00	626.595.536	74,50	689.255.089	74.50	689.255.089	Bidang Keluarga Berencana	Kota Bandung
			Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	2500	Orang	2500	209,240,000	250	230,164,000	250	253,180,400	250	278,498,440	250	306,348,284	3500	306,348,284	Kasie Jaminan Pelayanan	Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	Jumlah Motivator Akseptor KB Lestari	90	Pasangan Akseptor	90	168,462,500	90	185,308,750	90	203,839,625	90	224,223,588	90	246,645,946	90	246,645,946	Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	Kota Bandung
			Kegiatan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Jumlah Faskanes yang Mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	83	Fasyankes	83	93,068,000	85	102,374,800	86	112,612,280	87	123,873,508	88	136,260,859	88	136,260,859	Kasie Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Kota Bandung
			Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Bantuan DAK Non Fisik yang di faslitasi	1	Laporan	1	4,392,369,000												
			Kegiatan Sub Bidang KB (DAK Fisik)	Jumlah Bantuan DAK Fisik yang di faslitasi	1	Laporan	1	1,339,675,000												
Meningkatnya Ketahanan Keluarga			Program Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina Aktif	71.06	Persen	71.06	808.534.000	74.56	673.055.870	78.26	691.653.719	82.16	709.921.150	86.26	709.573.191	86.26	709.573.191	Bidang Ketahanan Keluarga	Kota Bandung
			Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan Anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	2504	Orang	2504	394,110,000	10	328,170,332	10	337,138,138	10	346,042,374	10	345,872,765	2544	345,872,765	Kasie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Kota Bandung
			Kegiatan Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK-R yang dibina	60	Kelompok	60	249,152,000	75	207,465,668	89	213,135,016	103	218,76	117	218,65	117	218,65		Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
																	Kasie Ketahanan Remaja			
			Kegiatan BKB,BKL, BKR	Jumlah Anggota Tribina (BKB, BKR,BKL) yang Mendapatkan Pembinaan dan Ber-KB	20730	Orang	30	165.272.000	30	137.619.870	30	141.380.565	30	145.114.600	30	145.043.474	20880	145.043.474	Kasie Balita, Anak dan Lansia	Kota Bandung
Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Program Promosi Keluarga Berencana		Jumlah peserta KB baru	2000	Orang	2500	1.003.004.000	2625	585.382.396	2757	601.378.954	2895	617.262.116	3040	616.959.574	3040	616.959.574	Bidang Promosi Keluarga Berencana	Kota Bandung	
			Jumlah Kampung KB Aktif	15	Kampung KB	20	1.003.004.000	31	585.382.396	40	601.378.954	49	617.262.116	58	616.959.574	58	616.959.574			
	Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB		Persentase PKB dan PLKB yang didayagunakan	100	Persen	100	251.902.000	100	147.017.356	100	151.034.853	100	155.023.870	100	154.947.887	100	154.947.887	Kasie Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	Kota Bandung	
			Persentase Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang didayagunakan	100	Persen	100		100		100		100		100		100				
	Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)		Jumlah Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	30	Kegiatan	30	506.102.000	30	295.375.892	30	303.447.535	30	311.461.960	30	311.309.301	30	311.309.301	Kasie Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	Kota Bandung	
	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan		Jumlah Kegiatan Advokasi	30 Kec	Kegiatan	30 Kec	245.000,00	16	142.989,14	3	146.896,560	4	150.776,28	3	150.702,38	26	150.702,38	Kasie Advokasi dan Penggerakan	Kota Bandung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Penggerakkan diKampung KB		Kegiatan			15		5		5		5		30			
	Meningkatnya PengendalianPenduduk		Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	Persen	100	857.380.000	100	713.929.307	100	733.438.626	100	752.809.647	100	752.440.668	100	752.440.668	Program Pengendalian Penduduk	Kota Bandung
			Kegiatan Penyusunan Datad dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	12	Dokumen	12	247.530.000	12	206.115,050	12	211.747,490	12	217.340.003	12	217.233.477	12	217.233.477	Kasie Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Kota Bandung
			Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk		Dokumen	1	340.260.000	-	283,330,129	-	291,072,601	-	298,760,189	-	298.613.755	1	298.613.755	Kasie Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	Kota Bandung
		Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	1		-		-		1									
		Raperda Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	-		1		1											
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kependudukan	0	Sekolah	12	269.590.000	12	224.484.128	12	230.618.535	12	236.709.455	12	236.593.435	60	236.593.435	Kasie Pembinaan Wawasan Kependudukan	Kota Bandung

6.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan DPPKB 2021-2023 sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas Kota Bandung dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas Kota Bandung sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indikator Perubahan Renstra DPPKB serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian Kota Bandung dan sasaran strategis;
- b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu baseline yang menjadi dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi anggaran DPPKB perlu memberikan input terhadap KPJM yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi;
- c. Transfer Ke Daerah Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan skema alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan, dan/atau DAK Afirmasi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD, Perubahan Renstra, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada RKP dan RKPD, serta tetap memperhatikan isu strategis program/kegiatan Bangga Kencana dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang

untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non- Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau *public private partnership* (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra DPPKB Kota Bandung dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra, artinya indikator kinerja DPPKB Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, DPPKB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	79,56	-	-	80,56	81,56	82,56	82,56 Persen
2	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	89,23	-	-	90,23	91,23	92,23	92,23 Persen
3	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	87,69	-	-	88,69	89,69	90,69	90,69 Persen
4	Rumah Dataku Aktif	24,62	-	-	24,62	30,77	36,92	36,92 Persen
5	Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	10,91	-	-	16,36	23,64	30,91	30,91 Persen
6	Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	76,24	-	-	76,27	76,92	77,57	77,57 Persen
7	Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)	13,19	-	-	13,00	12,00	11,00	11 Persen

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu	70,00	-	-	80,00	90,00	100,00	100 Persen
9	Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	-	-	-	53,09	54,07	54,07 Indeks
10	Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	N/A	-	-	-	48,13	48,58	48,58 Indeks

VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan telah dapat disusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Perubahan Rencana Strategi DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018 – 2023 . Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPPKB Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengendalian pembangunan.

Bandung, 7 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANDUNG**

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Population and Family Planning Control, Bandung City. The stamp contains the text 'DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681115 198803 1 005

LAMPIRAN TABEL IKK

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		IKK		0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.36	0.35	0.34	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
2	Total Fertility Rate (TFR)		IKK		1,94	1,93	1,92	1,91	1,90	1,94	1,93	1,92	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
3	Persentase DPPKB yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
4	Persentase DPPKB yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
5	Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		IKK		1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan		IKK		37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		IKK		4	5	6	7	8	4	5	6	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		IKK		2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
9	Ratio Akseptor KB		IKK		72,50	73	73,50	74	74,50	72,50	73	73,50	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun		IKK		72,50	73	73,50	74	74,50	72,50	73	73,50	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
																		-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun		IKK		20	19.5	19	18.5	18	20	19.5	19	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)		IKK		14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.8	14.7	14.6	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		IKK		41	41.5	42	42.5	43	41	41.5	42	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		IKK		72.5	73	73.5	74	74.5	72.5	73	73.5	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		IKK		59	61	63	65	67	59	61	63	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		IKK		51.95	52.0	52.50	53.0	53.50	51.95	52.0	52.50	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		IKK		34	36	38	40	42	34	36	38	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan DPPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		IKK		71	73	75	77	80	71	73	75	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		IKK		83	84	85	86	87	83	84	85	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		IKK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		IKK		86	87	88	89	90	86	87	88	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita		IKK		20	20	21	21	21	20	20	21	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		IKK		0,35	0,40	0,45	0,47	0,50	0,35	0,40	0,45	-	-	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 di atas, dapat dijelaskan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) DPPKB, seperti yang tergambar pada table berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja utama (IKU) Perubahan dan
Formulasi Pengukuran IKU DPPKB Kota
Bandung
Tahun 2018 - 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pengendalian Pendudukan dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	= $\frac{\text{Jumlah Kampung KB (Paripurna, Mandiri dan Berkembang)}}{\text{Jumlah Kampung KB}} \times 100\%$	
		Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	$TFR = \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p> $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>	
2	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	<p>Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel iBangga yang terdiri atas sebagai berikut :</p> <p>Dimensi Ketentraman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Ibadah 2. Legalitas keluarga 3. Jaminan kesehatan 4. Keharmonisan Keluarga <p>Dimensi Kemandirian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemenuhan kebutuhan dasar 6. Jaminan keuangan 7. Keberlangsungan pendidikan 8. Kesehatan keluarga 9. Akses Media Online <p>Dimensi Kebahagiaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Interaksi Keluarga 11. Interaksi Sosial 	

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB tahun 2018-2023, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh DPPKB setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKB tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

Target Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja utama (IKU) DPPKB Kota Bandung tahun 2020-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULASI PENGUKURAN
				2020	2021	2022	2023	
1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	33.33	35.38	38.10	39.68	= Jumlah Kampung KB (Paripurna, <u>Mandiri dan Berkembang</u>) x 100% Jumlah Kampung KB
			Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	1.97	2.00	2.00	2.00	$TFR = \sum_{i=15}^{49} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p> $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>
		Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	NA	-	55.84	56.84	Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel iBangga yang terdiri atas sebagai berikut : Dimensi Ketentraman : 1. Kegiatan Ibadah 2. Legalitas keluarga 3. Jaminan kesehatan 4. Keharmonisan Keluarga Dimensi Kemandirian : 5. Pemenuhan kebutuhan dasar 6. Jaminan keuangan 7. Keberlangsungan pendidikan 8. Kesehatan keluarga 9. Akses Media Online Dimensi Kebahagiaan : 10. Interaksi Keluarga 11. Interaksi Sosial